



Pemahaman Siswa SMA/SMK Kota Pasuruan Terhadap Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan di Indonesia

M. Mascun Andianto¹, Arum Masyitoh², Ajjiah³, Firza Agung Prakoso⁴

¹⁻⁴ Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No.27-29, Tembokrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118

Korespondensi penulis: mascunganteng@gmail.com¹, arummasvitoh216@gmail.com², afandiaziza629@gmail.com³, firza.agungprakoso@gmail.com⁴

Abstract. Employment law education plays an important role in equipping the younger generation, especially high school and vocational high school students, with an understanding of the rights and obligations as prospective workers. This study aims to analyze the relationship between students' understanding of employment law and employment rights and obligations. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires from grade XI students at SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, and SMK PGRI 2 Pasuruan. The validity results showed that all questionnaire items were valid (100%), while the reliability of the variables showed a Cronbach Alpha value of 0.606 for student understanding and 0.778 for labor rights and obligations. The simple linear regression model showed a significant positive relationship with the regression equation $Y = -0.833 + 0.997XY = -0.833 + 0.997X$ and an R Square value of 0.600, which means that 60% of the variation is explained by the model. This study confirms that employment law education has a real impact on students' legal awareness, supporting their preparation to face the world of work with a better understanding.

Keywords: Employment Law Education, Understanding Rights and Obligations, High School/Vocational High School Students

Abstrak. Pendidikan hukum ketenagakerjaan berperan penting dalam membekali generasi muda, khususnya siswa SMA dan SMK, dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai calon tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pemahaman hukum ketenagakerjaan siswa terhadap hak dan kewajiban ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dari siswa kelas XI di SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan. Hasil validitas menunjukkan seluruh butir angket valid (100%), sedangkan reliabilitas variabel menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,606 untuk pemahaman siswa dan 0,778 untuk hak dan kewajiban tenaga kerja. Model regresi linier sederhana menunjukkan hubungan positif signifikan dengan persamaan regresi $Y = -0,833 + 0,997XY = -0,833 + 0,997X$ dan nilai R Square 0,600, yang berarti 60% variasi dijelaskan oleh model. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan hukum ketenagakerjaan memiliki pengaruh nyata terhadap kesadaran hukum siswa, mendukung persiapan mereka menghadapi dunia kerja dengan pemahaman yang lebih baik.

Kata kunci: Pendidikan Hukum Ketenagakerjaan, Pemahaman Hak dan Kewajiban, Siswa SMA/SMK

1. LATAR BELAKANG

Generasi muda, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu diperkenalkan dengan pendidikan hukum ketenagakerjaan. (Widodo et al. 2023). Sebagai contoh, siswa di SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan merupakan bagian dari generasi yang akan segera memasuki dunia kerja. Mereka akan lebih menyadari hak dan tanggung jawab mereka di tempat kerja jika mereka memiliki pendidikan hukum yang memadai. (Haidar, Ahmad Fadhil, Rizky Sri Hapsari, Rr. Luh Sekar Nur Sukmawati 2024). Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka

menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja.

Perlunya pemahaman hukum ketenagakerjaan juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang melindungi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. (Suwandi, Wardana, and Gresik 2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan hukum perlindungan pekerja mendukung hal tersebut. Melalui program pendidikan hukum ketenagakerjaan, siswa dari SMKN 1 Pasuruan dan SMK PGRI 2 Pasuruan, sebagai calon tenaga kerja profesional, dapat belajar mengenai ketentuan dasar hukum yang relevan, seperti jam kerja, upah minimum, dan sistem penyelesaian konflik hubungan industrial. (Elsera and Lesmana 2022).

Terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu manfaat dari pendidikan hukum ketenagakerjaan. Dengan menggunakan konsep Pendekatan Kemampuan dari (Mubarok 2021), peningkatan kapasitas individu, termasuk pemahaman terhadap hukum, adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas peluang. Dengan memahami regulasi ketenagakerjaan, siswa dari SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan dapat lebih percaya diri dalam mengelola karier mereka di masa depan, baik sebagai pekerja maupun pengusaha.

Dalam menghadapi era digital, siswa dari ketiga sekolah ini juga perlu memahami tantangan baru dalam ketenagakerjaan berbasis platform digital. Teori Disruptive Innovation dari Christensen (1997) dalam (Margiono 2024) menyoroti dampak besar teknologi terhadap pola kerja. Pendidikan hukum ketenagakerjaan harus mencakup isu-isu seperti hak pekerja freelance dan mekanisme perlindungan kerja di sektor gig economy. Dengan pemahaman ini, siswa akan siap menghadapi revolusi industri 4.0 secara legal dan profesional.

Pendidikan hukum ketenagakerjaan di tingkat SMA/SMK, seperti di SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan, tidak hanya relevan bagi siswa sebagai calon tenaga kerja tetapi juga penting dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. Siswa dari ketiga lembaga ini menghadapi kendala yang sulit di tempat kerja sebagai calon karyawan yang akan segera memasuki dunia kerja. Agar mereka mengetahui hak dan tanggung jawab mereka di tempat kerja, penting bagi mereka untuk memahami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Fotaleno and Batubara 2024).

Pasal 77 yang mengatur jam kerja merupakan salah satu komponen utama undang-undang tersebut. Pasal ini memastikan bahwa mahasiswa mengetahui bahwa jam kerja maksimum adalah tujuh jam sehari selama enam hari kerja atau delapan jam sehari selama lima hari kerja. Dengan perlindungan upah minimum, Pasal 88 menjamin hak pekerja untuk

mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup sejahtera. Mahasiswa memiliki landasan hukum untuk menuntut lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai dengan Pasal 86 yang menjunjung tinggi hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. (Salma Elsa Anindya 2024).

Penerapan pendidikan hukum ini di SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan dapat dilakukan melalui metode simulasi kasus atau diskusi kelompok, mengacu pada klausul yang mengatur penyelesaian masalah hubungan ketenagakerjaan dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 169. (Ariyanti 2024). Dengan simulasi ini, siswa akan lebih memahami bagaimana mekanisme mediasi atau penyelesaian konflik hubungan kerja dijalankan dalam dunia nyata.

Selain itu, isu-isu ketenagakerjaan di era digital juga relevan bagi siswa dari ketiga sekolah ini. Misalnya, pekerjaan berbasis platform digital yang belum sepenuhnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Siswa yang memahami Pasal 90, Paragraf 1, yang melarang pembayaran gaji di bawah upah minimum, akan lebih siap menghadapi kesulitan pekerjaan kontemporer, termasuk dalam ekonomi pertunjukan. (Lilis, Saepudin, and Wulandari 2023).

Dengan pendidikan hukum ketenagakerjaan yang komprehensif, siswa dari SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan tidak hanya akan memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memiliki bekal untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, sadar hukum, dan mampu berkontribusi dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. (RAFINDO 2024).

Kesimpulannya, pengajaran hukum ketenagakerjaan kepada siswa di SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan merupakan langkah yang terencana untuk mencetak generasi baru yang sadar hukum, bermoral, dan siap bekerja. Dengan pendekatan berbasis teori, pendidikan ini menumbuhkan budaya kerja yang adil dan damai di samping meningkatkan kompetensi individu.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Human Capital

Teori *Human Capital* menjelaskan bahwa pendidikan adalah investasi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu. (Aminuddin, Ahmad Sukri Harahap n.d.). Dalam konteks ini, memberikan materi hukum ketenagakerjaan kepada siswa SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami undang-undang yang berkaitan dengan hak atas upah layak, kontrak

kerja dan keselamatan di tempat kerja. Pengetahuan ini menjadi modal penting bagi mereka untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja yang semakin kompetitif.

Teori Social Learning

Teori *Social Learning* menekankan bahwa individu belajar dari pengamatan terhadap lingkungannya. (Sisin Warini, Yasnita Nurul Hidayah 2023). Melalui simulasi kasus hukum ketenagakerjaan, seperti penyelesaian konflik kerja atau kasus pelanggaran hak pekerja, siswa SMAN 3 Pasuruan dapat mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Metode ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan etika kerja sejak dini.

Teori Justice As Fairness

Pentingnya keadilan dalam hubungan sosial, khususnya hubungan kerja, ditegaskan oleh gagasan (Yuanita 2022) tentang keadilan sebagai kewajiban. Dengan pendidikan hukum ketenagakerjaan yang diterapkan di SMKN 1 Pasuruan, siswa dapat memahami bagaimana prinsip keadilan bekerja dalam praktik ketenagakerjaan, misalnya dalam penentuan upah atau pemberian fasilitas kerja yang setara. Pengetahuan ini akan membantu mereka untuk menuntut hak secara bijak tanpa mengabaikan kewajiban mereka sebagai bagian dari sistem kerja.

Teori Legal Consciousness

Teori *Legal Consciousness* dalam (Sukmatika 2024) juga relevan untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum memengaruhi tindakan individu. Siswa dari SMK PGRI 2 Pasuruan yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih cenderung memilih jalur legal dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan, seperti melalui mekanisme mediasi atau pengadilan hubungan industrial. Pendidikan hukum ketenagakerjaan akan membentuk pola pikir yang mendukung terciptanya budaya hukum di dunia kerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji hubungan antara pengetahuan mahasiswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai calon karyawan dengan pendidikan mereka dalam hukum ketenagakerjaan menggunakan metodologi kuantitatif dan metode survei. (Rif'atin Hubbaya 2022). Karena memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel secara objektif menggunakan data terstandarisasi dan dievaluasi secara statistik, maka metode kuantitatif dipilih. Kuesioner berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data survei. Kuesioner dirancang untuk mengukur dua variabel utama: pendidikan hukum ketenagakerjaan sebagai variabel independen dan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban ketenagakerjaan sebagai

variabel dependen. Alat ini mengukur pendapat siswa secara kuantitatif dengan meminta mereka menilai serangkaian item pada skala Likert lima poin, dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju".

Siswa kelas XI dari tiga sekolah berbeda menjadi populasi penelitian, yaitu SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan. Pemilihan kelas XI didasarkan pada asumsi bahwa siswa di tingkat ini sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang dunia kerja melalui mata pelajaran terkait, seperti kewirausahaan atau prakarya. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan dari berbagai kelas dan jurusan, seperti kelas XI dan jurusan kejuruan teknik. (Hersusetiyati and Sopyan 2019). Penentuan ukuran sampel didasarkan pada rumus Slovin, yang memperhitungkan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. Untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih besar, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mencoba dan mengumpulkan data yang representatif.

Sebelum pengumpulan data utama, kuesioner diuji coba pada kelompok kecil siswa yang tidak termasuk dalam sampel utama untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas diuji menggunakan metode content validity, di mana isi kuesioner dikaji oleh ahli di bidang pendidikan dan hukum ketenagakerjaan untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian. (Khairunnisak 2023). Sementara itu, konsistensi internal setiap item kuesioner dinilai menggunakan pendekatan Cronbach's Alpha untuk menentukan keandalan. Pengumpulan data primer dapat dilanjutkan jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

Siswa di sekolah yang berpartisipasi menerima kuesioner secara langsung sebagai bagian dari proses pengumpulan data. (Fauzi 2024). Sebelum penyebaran, siswa diberikan penjelasan singkat tentang tujuan penelitian, pentingnya partisipasi mereka, dan jaminan kerahasiaan data. Setelah diisi oleh responden, semua kuesioner dikumpulkan dan ditinjau untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat atau kurang. Data yang valid kemudian diolah menggunakan perangkat lunak statistik, seperti SPSS, untuk analisis lebih lanjut.

Metode regresi linier sederhana digunakan untuk analisis data. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai variabel dependen dan pendidikan hukum ketenagakerjaan sebagai variabel independen diuji menggunakan metode ini. (Dirgantara 2024). Sebelum menjalankan analisis regresi, dilakukan beberapa uji asumsi, termasuk uji normalitas untuk memastikan distribusi data mendekati normal, uji linearitas untuk memastikan hubungan linier antara variabel, dan uji homoskedastisitas untuk memastikan varians residual tidak berubah pada rentang nilai variabel independen.

Model regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pendidikan hukum ketenagakerjaan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman siswa. Representasi kuantitatif dari tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diberikan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Untuk memastikan apakah hubungan yang diamati signifikan secara statistik pada tingkat keyakinan 95%, uji signifikansi statistik, seperti uji-t, juga ditambahkan ke temuan analisis.

Temuan analisis kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum ketenagakerjaan memiliki dampak nyata pada pemahaman siswa jika ditemukan korelasi yang substansial. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa variabel tambahan yang dapat memengaruhi pemahaman siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka jika asosiasinya tidak substansial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara empiris signifikansi pendidikan hukum ketenagakerjaan bagi siswa sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan, khususnya di Pasuruan, dengan menggunakan metodologi ini. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi dasar bagi sekolah, seperti SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, dan SMK PGRI 2 Pasuruan, untuk mengintegrasikan materi hukum ketenagakerjaan dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan hukum generasi muda secara signifikan sekaligus melatih mereka menjadi profesional yang berketerampilan tinggi dan berdaya saing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepuluh pertanyaan pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Validitas empiris kuesioner ditetapkan sebesar 100% valid berdasarkan data yang terkumpul.

Tabel 1. Rangkuman Uji Validitas Angket Pemahaman Siswa SMA/SMK

No	Kriteria	Jumlah	Nomor Butir Pernyataan	Persentase (%)
1	Valid	10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	100%
Jumlah		10	10	100%

Temuan uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel X memiliki skor Cronbach Alpha sebesar 0,606, di atas kriteria dependabilitas sebesar 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur variabel X dianggap dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur konsep yang dimaksud. Alat ukur untuk variabel Y dianggap lebih dapat dipercaya daripada variabel X karena nilai Cronbach Alpha-nya sebesar 0,778 lebih tinggi daripada nilai

tipikal sebesar 0,600. Hasilnya, alat yang digunakan untuk kedua variabel ini memenuhi standar dependabilitas, sehingga cocok untuk penggunaan penelitian.

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari ambang signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara teratur, yang merupakan hipotesis nol (H_0). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data residual tidak memiliki distribusi normal. Jika analisis yang akan dilakukan, seperti regresi linier atau uji parametrik lainnya, mengasumsikan distribusi normal, perbedaan ini harus diperhatikan. Untuk analisis tambahan, peneliti mungkin perlu memikirkan metode nonparametrik atau modifikasi data. Nilai signifikan (Sig.) variabel bebas Pemahaman Siswa SMA/SMK adalah 0,118, lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 0,05, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada heteroskedastisitas tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang menyatakan bahwa varians residual bersifat homogen. Dengan demikian, tidak ditemukan tanda-tanda masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 2.472. Nilai ini mendekati angka 2 yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi pada residualnya. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terjadi autokorelasi dapat diterima. Model regresi yang digunakan memenuhi asumsi bebas autokorelasi, sehingga dapat dikatakan valid untuk dilakukan analisis lebih lanjut tanpa adanya indikasi masalah autokorelasi. Namun, untuk mendapatkan interpretasi yang lebih akurat, nilai tersebut sebaiknya dibandingkan dengan batas kritis Durbin-Watson (dL dan dU) berdasarkan jumlah data dan variabel dalam model.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, variabel bebas pemahaman siswa SMA/SMK mampu menjelaskan 60% varians variabel terikat hak dan kewajiban pekerja, yang ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 0,600. Sebaliknya, perubahan ukuran sampel dan jumlah variabel dalam model tercermin dalam nilai Adjusted R Square sebesar 0,591, yang sedikit lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kapasitas prediktif yang kuat dan variabel bebas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjelasan varians variabel terikat. Meskipun demikian, faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam model masih mencakup 40% varians. Dengan pemahaman bahwa variabel yang digunakan mencakup sebagian besar variasi, model ini dapat digunakan untuk studi tambahan. Variabel Pemahaman Siswa SMA/SMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Hak dan Kewajiban Pekerja, berdasarkan hasil uji t parsial (Nilai Sig. = 0,000, lebih kecil dari 0,05). Dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama, koefisien $B = 0,997$ menunjukkan

bahwa untuk setiap peningkatan satu unit pemahaman siswa, nilai hak dan kewajiban pekerja akan naik sebesar 0,997 satuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara pengetahuan siswa dengan kesadaran tentang hak dan kewajiban pekerja; artinya, semakin banyak siswa memahami, semakin tinggi kesadarannya.

Persamaan regresi berikut diperoleh dari hasil uji regresi linier sederhana: Hak dan Kewajiban Pekerja = $-0,833 + 0,997 \times \text{Pemahaman Siswa SMA/SMK}$. Berdasarkan koefisien intersep $-0,833$, nilai hak dan kewajiban pekerja diproyeksikan sebesar $-0,833$ apabila pemahaman Siswa SMA dan SMK adalah nol. Sebaliknya, koefisien Pemahaman Siswa SMA/SMK sebesar 0,997 berarti setiap kenaikan satuan pemahaman siswa, maka Hak dan Kewajiban Pekerja juga akan naik sebesar 0,997 satuan. Hasil uji t menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan siswa SMA dan SMK tentang hak dan kewajiban pekerja dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahamannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Instrumen penelitian telah dievaluasi secara memadai, sebagaimana dibuktikan oleh hasil analisis, yang menunjukkan bahwa semua 10 pertanyaan kuesioner dianggap valid dengan tingkat validitas 100%. Mengenai ketergantungan, variabel Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,778 dan variabel Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (X) memiliki nilai sebesar 0,606, keduanya lebih tinggi dari batas tipikal sebesar 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa alat tersebut andal dalam menilai konstruk yang dimaksud. Teknik analisis alternatif harus dipertimbangkan jika diperlukan karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data residual tidak terdistribusi secara teratur. Uji Glejser menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas (nilai signifikansi 0,118), dan nilai Durbin-Watson sebesar 2,472 menunjukkan tidak terdapat autokorelasi. Pemahaman siswa SMA/SMK menyumbang 60% keragaman hak dan kewajiban pekerja, berdasarkan nilai R Square uji koefisien determinasi sebesar 0,600. Dengan nilai signifikansi 0,000, variabel Pemahaman Siswa SMA/SMK memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja = $-0,833 + 0,997 \times \text{Pemahaman Siswa SMA/SMK}$ merupakan persamaan regresi yang dihasilkan. $-0,833 + 0,997 \times \text{Pemahaman Siswa SMA/SMK} = \text{Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja}$, yang menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan pemahaman siswa, akan terjadi kenaikan 0,997 satuan dalam pengetahuan tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Dengan hasil bahwa pemahaman siswa secara signifikan memengaruhi

peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, model ini sah dan cocok untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR REFERENSI

- Aminuddin, Ahmad Sukri Harahap, & M. Nuh Dawi. (n.d.). Sistem finansial pendidikan di Indonesia (Analisis tentang signifikansinya terhadap pengelolaan human capital). 119–130.
- Anindya, S. E., & Damayanti, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(4), 572–579.
- Ariyanti, N. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja yang PHK sepihak oleh perusahaan (Studi kasus putusan No.10/PDT.SUS-PHI/2022/PNBJM). *Jurnal Syntax Admiration*, 2(4), 481–498.
- Dirgantara, T. (2024). Pengaruh faktor sosiodemografis terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2000–2022. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Elsera, E., & Lesmana, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. (2019).
- Fauzi, A. (2024). Pemahaman dan penerapan etika lingkungan siswa SMP di Salatiga. 75–84.
- Fotaleno, F., & Batubara, D. S. (2024). Fenomena kesulitan generasi Z dalam mendapatkan pekerjaan ditinjau perspektif teori kesenjangan generasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3199–3208. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1513>
- Haidar, A. F., Hapsari, R. S., Sukmawati, R. L. S. N., & Natanael, R. (2024). Analisis pelanggaran ketenagakerjaan (Studi kasus PT. Indonesia Bakery Family). *Jurnal Syntax Admiration*, 3(2), 398–408.
- Hersusetiyati, & Sopyan, A. (2019). Pengaruh pengembangan karier terhadap produktivitas tenaga kerja. *E-Proceedings*, 1(1), 49–56.
- Hubbaya, R. (2022). Pengaruh manajemen praktik kerja lapangan (PKL) dan manajemen bursa kerja khusus (BKK) terhadap kesiapan kerja peserta didik SMK di Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(2), 9–25.
- Khairunnisak. (2023). Pengembangan E-LKPD berbasis Liveworksheets pada pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. *Nuclear Physics*, 13(1), 104–116.
- Lilis, S., & Wulandari, G. (2023). Penyuluhan pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi guna menekan minat lulusan SLTA untuk bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran. *Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 128–135.
- Margiono, A. (2024). Inovasi berkelanjutan strategi manajemen untuk menghadapi disrupsi teknologi di 2024. *Jurnal Inovasi Global*, 2(3), 543–551.

- Mubarok, M. S. (2021). Strategi pembangunan ekonomi perspektif Islam dan relevansinya terhadap pembangunan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 1(3).
- Rafindo, Y. (2024). Perspektif guru dan siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun entrepreneurship alumni.
- Sukmatika, A. A. Y. (2024). Analisis maraknya eksploitasi buruh anak pasca liberalisasi perdagangan di Tiongkok. *Humaniorum*, 2(3), 28–35. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.53>
- Suwandi, F. R., Wardana, D. J., & Universitas Muhammadiyah Gresik. (2022). Aspek hukum keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(1), 251–262.
- Warini, S., Hidayah, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori belajar sosial dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 2, 566–576.
- Widodo, B., Kwat, T., Sayuti, M., Pendidikan Guru Vokasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. (2023). Evaluasi pelaksanaan kelas industri di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta dan SMK Pancasila Surakarta. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7(1), 22805–22819.
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah konsep keadilan hukum teori keadilan John Rawls dalam keputusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 130. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>